

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk mengkaji lebih lanjut dinamika dalam implementasi kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan PMI sektor domestik, khususnya dalam melihat bagaimana keberadaan instrumen kerja sama formal seperti MoU 2022 dan mekanisme OCS berelasi dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik tetap menghadapi hambatan meskipun telah memiliki MoU 2022 karena kerja sama tersebut berlangsung dalam kondisi *complex interdependence* yang membatasi konsistensi implementasi. Hambatan ini tidak disebabkan oleh ketiadaan instrumen kerja sama, melainkan oleh tiga kondisi utama, yaitu keberagaman aktor dan jalur interaksi yang membatasi kontrol negara, adanya perbedaan prioritas kepentingan antara kedua negara, serta sifat kerja sama yang bergantung pada komitmen politik tanpa adanya mekanisme pemaksaan yang mengikat. Dengan demikian, MoU 2022 tidak secara otomatis menghasilkan implementasi yang selaras, karena pelaksanaannya sangat ditentukan oleh dinamika hubungan dan pilihan kebijakan masing-masing negara.

Melalui karakteristik *multiple channels*, penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi dalam mekanisme penempatan PMI tidak hanya berlangsung melalui jalur formal antarnegara, tetapi juga melalui interaksi antar lembaga pemerintah serta

keterlibatan aktor non-negara. Keberadaan forum teknis seperti Joint Working Group (JWG) menunjukkan bahwa kerja sama berkembang ke tingkat operasional, namun pada saat yang sama proses migrasi juga melibatkan jaringan perantara informal yang berada di luar kendali negara. Kondisi ini menyebabkan mekanisme formal seperti One Channel System (OCS) tidak menjadi satu-satunya jalur dalam praktik penempatan. Tingginya kasus penempatan non-prosedural menunjukkan bahwa keberagaman saluran interaksi justru menciptakan keterbatasan kontrol institusional, sehingga implementasi kerja sama berjalan dalam kondisi yang terfragmentasi.

Selanjutnya, melalui karakteristik *absence of hierarchy among issues*, penelitian ini menemukan bahwa implementasi kerja sama dipengaruhi oleh interaksi kepentingan isu yang dibawa oleh negara yang tidak tersusun dalam prioritas yang tetap. Indonesia mendorong perlindungan PMI sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap warga negaranya, sementara Malaysia menghadapi kebutuhan tenaga kerja domestik yang tinggi sebagai bagian dari kepentingan ekonomi. Perbedaan orientasi ini menyebabkan isu perlindungan tidak selalu menjadi pertimbangan utama dalam praktik kebijakan. Dalam konteks ini, penggunaan mekanisme seperti SMO mencerminkan adanya isu lain yang berjalan bersamaan dengan komitmen perlindungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerja sama tidak berjalan secara konsisten, melainkan dipengaruhi oleh tarik-menarik kepentingan yang menghasilkan penyesuaian kebijakan di tingkat implementasi.

Sementara itu, melalui karakteristik *minor role of military force*, penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama Indonesia dan Malaysia dijalankan dalam konteks non-koersif, di mana tidak terdapat instrumen yang dapat memaksa negara untuk menjalankan kesepakatan secara seragam. Dalam menghadapi ketidaksesuaian implementasi, Indonesia merespons melalui jalur diplomasi seperti moratorium sementara dan negosiasi bilateral. Namun, respons tersebut tidak bersifat memaksa, melainkan bergantung pada kesediaan Malaysia untuk menyesuaikan kebijakan yang diambil. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja sama sangat ditentukan oleh komitmen politik dan kepentingan masing-masing negara, sehingga implementasi dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan domestik. Dengan demikian, tidak adanya mekanisme pemaksaan yang mengikat menjadikan kerja sama bersifat fleksibel, tetapi sekaligus membuka ruang bagi ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan dalam kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan PMI sektor domestik merupakan konsekuensi dari struktur hubungan yang kompleks, di mana banyaknya aktor yang terlibat, beragamnya kepentingan yang saling berinteraksi, serta sifat kerja sama yang berbasis pada komitmen politik menyebabkan implementasi tidak selalu berjalan secara selaras dengan kesepakatan yang telah dibentuk. Oleh karena itu, kerja sama dalam konteks ini tidak dapat dipahami sebagai mekanisme yang berjalan secara linear dari kesepakatan menuju pelaksanaan, melainkan sebagai proses yang dinamis dan dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor dalam hubungan antarnegara.

## 4.2. Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini berfokus pada level hubungan antarnegara dan institusi, sehingga belum secara mendalam mengkaji dinamika pada level masyarakat sebagai aktor yang terlibat langsung dalam proses migrasi tenaga kerja. Kedua, keterbatasan data terutama terkait praktik non-prosedural menyebabkan analisis lebih banyak bertumpu pada data pengaduan dan wawancara institusional, sehingga belum sepenuhnya menangkap pengalaman dan perspektif aktor di tingkat akar rumput. Ketiga, penelitian ini lebih menitikberatkan pada dinamika kebijakan, sehingga belum secara spesifik mengkaji faktor sosial yang mendorong keberlanjutan praktik migrasi di luar mekanisme formal.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji karakteristik sosial calon pekerja migran Indonesia, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang mendorong mereka untuk memilih jalur migrasi, termasuk jalur non-prosedural. Kajian ini dapat mencakup aspek seperti tingkat pendidikan, akses informasi, kondisi ekonomi, serta persepsi terhadap prosedur migrasi resmi. Pendekatan ini penting untuk melihat bahwa praktik migrasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan negara, tetapi juga oleh kondisi sosial dan pertimbangan individu yang membentuk keputusan migrasi.

Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi perspektif masyarakat Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia, khususnya dalam sektor domestik. Hal ini mencakup bagaimana persepsi terhadap pekerja migran memengaruhi pola permintaan tenaga kerja, preferensi terhadap sistem rekrutmen,

serta sikap terhadap kebijakan perlindungan yang diberlakukan. Dengan memahami perspektif masyarakat penerima, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana dinamika sosial di negara tujuan turut membentuk praktik migrasi dan implementasi kerja sama.